



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

DIKERUK: Alat berat mengeruk endapan lumpur muara yang menuju perairan Benoa.

Siagakan Alat Berat hingga Pompa Air Raksasa

ANTISIPASI MUSIM PENGHUJAN

- Rakor lintas intansi digelar untuk wilayah Bali.
- Perangkat antisipasi bencana dari personel hingga peralatan sudah disiapkan di sembilan kabupaten/kota.
- Pemetaan wilayah rawan banjir dan longsor.
- Menempatkan alat berat di sejumlah lokasi seperti Karangasem, Tabanan, dan Bangli.
- Pembersihan gorong-gorong, beton drainase, dan merevitalisasi sungai.
- Untuk antisipasi, selain menganggarkan sebesar Rp 20 miliar, khusus BPBD juga menerjunkan sekitar 500 personel lebih.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali bersama tim penanggulangan bencana daerah melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama membahas kesiapsiagaan bencana.

COVER
STORY

Dari 18 Titik, Baru
11 Titik Banjir yang
Bisa Ditangani

Baca halaman 22

KEPALA BPBD Provinsi Bali Dewa Made Indra, Jumat (27/11) lalu, menegaskan rakor yang dihadiri tim penanggulangan bencana itu sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah dalam mengantisipasi ancaman bencana saat perubahan musim datang ■

► *Baca Siagakan... Hal 31*

Edisi : 29 NOV 2015

Hal : 21



Gelontor Rp 76 Miliar untuk Antisipasi Banjir di Samigita

■ SIAGAKAN...

Sambungan dari hal 21

Dijelaskan, sesuai prakiraan BMKG Wilayah III Denpasar, pergantian musim dari kemarau ke musim penghujan akan terjadi, pada awal Desember 2015 dengan puncak hujan terjadi antara Januari-Februari 2015. "Untuk itu, sebagai upaya antisipasi tim penanggulangan bencana telah melakukan rakor dan mempersiapkan seluruh perangkat," tegasnya.

Disebutkan, sejumlah perangkat untuk antisipasi bencana khususnya bencana tanah longsor dan banjir di 9 kabupaten/kota se Bali itu, yakni di antaranya persiapan personel, peralatan (peralatan berat dan ringan), logistik, obat-obatan, tenaga medis, sistem komunikasi, dan juga anggaran. "Sehingga saat musim hujan tiba nanti, seluruh kelengkapan dan sarana pendukung sudah siap," tambahnya.

Termasuk, sebagai bagian dari antisipasi, BPBD Provinsi Bali bersama tim penanggulangan bencana daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga telah melakukan pemetaan terhadap kawasan yang rawan atau berpotensi terjadinya bencana. Bahkan alat berat sudah disiagakan di kawasan rawan longsor seperti Bedugul, Tabanan (Penempatan alat berat di Pancasari); Karangasem (Kubu); dan Kintamani (Bangli).

Sedangkan untuk banjir, imbuhan Dewa Made Indra, pihak BPBD Provinsi Bali, bersama Balai Sungai juga telah melakukan antisipasi dengan pembersihan gorong-gorong, got, pemasangan beton drainase, dan merevitalisasi. Selain Pemprov Bali di pihak kabupaten/kota telah mengalokasikan dana sebesar Rp 20 miliar,

untuk personel, khusus BPBD telah mempersiapkan sebanyak 500 lebih personel di setiap posko dengan siaga 24 jam.

Di bagian lain di Badung. Anggaran Rp 76 miliar digelontorkan untuk menanggulangi banjir di kawasan Seminyak, Legian, dan Kuta (Samigita). Proyek melawan banjir itu berada di Kecamatan Kuta. Yang terbesar adalah penataan muara Tukad Mati di lingkungan Patasari, Jaba Jero, Kuta. Proyek penataan muara Tukad Mati ini menghabiskan dana Rp 47 miliar. Jenis pengerjaan meliputi pembuatan long storage atau penguatan dinding sungai sepanjang 500 meter. Selain itu juga dilakukan normalisasi. Tukad Mati disulap menjadi sungai dalam dan lebar.

Selama ini muara Tukad Mati dianggap menjadi biang keladi terjadinya banjir di Kuta hingga Nusa Dua. Tukad Mati berubah yang semestinya mengalirkan air sungai menuju Teluk Benoa justru menjadi daratan baru. Tidak hanya sampah biasa, bahkan kasur, bantal dan guling menumpuk di muara Tukad Mati. Alhasil air sungai meluap ke daratan dan menggenangi rumah penduduk. "Karena itu kami berusaha keras agar Tukad Mati ini tidak mati lagi. Saya yakin jika Tukad Mati ini lancar, maka kecil kemungkinan terjadi banjir di wilayah Kuta," papar Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kabupaten Badung, IB Surya Suamba belum lama ini.

Selain muara Tukad Mati, proyek besar juga dilakukan di Jalan Dewi Sri Kuta, yang masih satu alur dengan muara Tukad Mati. Proyek pembuatan rumah pompa penyedot air. Untuk proyek membuat pompa dan kegiatan lain di Jalan Dewi Sri Kuta menelan

dana Rp 26 miliar. Jalan Dewi Sri dan sekitarnya selama ini juga dikenal sebagai langganan banjir setiap tahun. Masifnya pembangunan, pendangkalan sungai hingga sampah menjadi pemicu terjadinya banjir.

Tiap kali musim penghujan kawasan rawan banjir di kawasan Kuta salah satunya adalah di Jalan Dewi Sri. Pasalnya, kawasan ini dulunya merupakan loloan atau daerah buangan air. "Namun kini dengan himpitan pembangunan menyebabkan pembuangan air menuju Tukad Mati terganggu. Sehingga disana memerlukan alat untuk membuang air menuju Tukad Mati," papar Suamba.

Sementara itu, Kabid Pengairan Dinas BMP Kabupaten Badung AA Dalem menjelaskan, pompa ini nantinya akan menyedot air drainase meluap. Air akan dibuang ke sungai sehingga air drainase tidak meluber ke jalan dan pemukiman. Pompa mulai dipasang Kamis (26/11) lalu. Pemasangan pompa tersebut langsung dilakukan tim teknis dari Korea Selatan, tempat asal pompa penyedot air dipesan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pompa raksasa untuk mengatasi banjir tersebut bisa menyedot air hingga 1.500 liter per detik. Sehingga pihaknya optimistis pemasangan pompa dapat mencegah terjadinya banjir seperti lumrah terjadi selama ini. Program penanggulangan banjir tak saja mengandalkan pemasangan pompa semata. Tapi juga dilakukan normalisasi alur sungai sudah digalakkan pemerintah jauh-jauh hari. Termasuk megaprojek pembangunan long storage penguatan dan pelebaran dinding Muara Tukad Mati telah dikerjakan. (didik/sandi/hendri/mertawan/gup)



Tambahan Modal Bank BPD Ditolak

TABANAN – DPRD Tabanan menolak penambahan penyertaan modal di Bank BPD Bali. Pihak “Dewan Sanggulan” tidak menyetujui penyertaan modal baru ini dengan alasan belum adanya ketentuan tentang seberapa besar penyertaan modal yang dialokasikan dari masing-masing daerah.

“Berdasarkan pembahasan di masing-masing komisi dan pendapat fraksi dalam rapat Paripurna Intern, Ranperda Penyertaan Modal pada BPD Bali tidak disetujui karena belum ada ketentuan tentang seberapa

besar penyertaan modal yang dialokasikan dari masing-masing daerah,” ujar Sekretaris DPRD Tabanan I Nyoman Susila usai sidang paripurna kemarin.

Meskipun menolak penyertaan modal di bank BPD Bali, DPRD Tabanan menyetujui dua Ranperda. Yakni tentang penyertaan modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara Provinsi Bali dan Ranperda tentang RAPBD tahun 2016. Hal itu ditunjukkan dalam penandatanganan antara Penjabat Bupati Tabanan dan pimpinan DPRD Tabanan dalam sidang yang dipimpin Ketut “Boping” Suryadi.

“Setelah persetujuan ini, diajukan ke Gubernur Bali guna evaluasi dan selanjutnya ditetapkan menjadi Perda. Diharapkan tahapan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga penetapannya bisa segera dilaksanakan,” lanjutnya.

Terkait pengesahan Ranperda APBD 2016, DPRD Tabanan melalui Sekwan merekomendasikan beberapa point kepada Pemkab Tabanan. Di antaranya, DPRD menyarankan unit-unit penghasil agar melakukan intensifikasi penerapan e-ticketing

pada obyek-obyek pariwisata, mengingat terbatasnya sumber pendanaan yang tersedia. Selain itu legislatif juga mengajak eksekutif bersama-sama memaksimalkan loby-loby ke Provinsi dan Pusat mengingat selama ini bantuan yang dikucurkan dari provinsi dan pusat masih sangat kecil.

“Karena di satu sisi kita sangat memerlukan dana-dana tersebut untuk membiayai pembangunan daerah mengingat fiskal kita sangat kecil,” lanjutnya.

Dalam Sidang Paripurna disampaikan PAD Kabupaten Tabanan sebesar Rp 270,777 miliar lebih

yang terdiri dari pajak Rp 96,019 miliar, retribusi daerah sebesar Rp 43,362. miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 7,322 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp 124,073 miliar. Total, pendapatan daerah dipatok Rp 1,75 triliun dan belanja dalam APBD Rp 1,840 triliun, yang terdiri dari belanja langsung Rp 621,139 miliar, belanja tak langsung sebesar Rp 1,219 triliun, sehingga defisit sebesar Rp 44,52 miliar.

“Besarnya defisit tersebut akan ditutupi dari SILPA TA 2015,” tukasnya. (ras/yor)